

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT TENGAH DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

SANTI^{1*}

NIM : E1011161073

Dedi Kusnadi², Arifin²

*Email: santimul@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil kebijakan pengelolaan pasar tradisional yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan mengenai Keberadaan pasar rakyat yang menjadi pusat kegiatan perdagangan yang potensial dalam menggerakkan aktifitas perekonomian masyarakat, namun pelaksanaan kebijakannya belum berjalan dengan optimal dan menyebabkan eksistensi pasar tradisional atau pasar rakyat menjadi menurun. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut Dunn(2003:611), yaitu 1).Efektivitas. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan oleh dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan belum terlaksana dengan baik, dimana kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima di area pasar. 2) Efisiensi. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belumlah efisien dalam hal sumber daya manusia, dimana masih kekurangan tenaga kerja untuk mengelola pasar. 3) Kecukupan. hasil penelitian menunjukkan kurangnya sosialisasi dan pengawasan kepada para pedagang oleh petugas pengelola belum berjalan dengan maksimal. 4) Perataan. hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang tegasnya pihak pengelola terhadap pedagang yang tidak mematuhi aturan. 5) Responsivitas. hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat sangat rendah dalam mentaati aturan yang ada. 6) Ketepatan. hasil penelitian menunjukkan hambatan yang di hadapi yaitu kurang disiplinnya pedagang hingga belum bisa merubah pola pelayanan lama. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu diharapkan pihak pengelola lebih tegas dan aktif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap para pedagang guna meningkatkan keadaan pasar dan penataan pasar yang lebih baik.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Penataan Pasar Rakyat Tengah

**THE EVALUATION OF THE MIDDLE PEOPLE'S MARKET MANAGEMENT
POLICY IN PONTIANAK CITY**

By:

SANTI^{1*}

ID: E1011161073

Dedi Kusnadi², Arifin²

*Email: santimul@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

This study aimed to describe and analyze the result of the traditional marketer management policy according to the Regional Regulation Number 2 of 2017. This research was based on problems regarding the existence of the people's market which is the center of potential trade activities in mobilizing the community's economic activities, but the implementation of the policy had not run optimally and had led to the existence of the market traditional or people's markets were declining. This study used a qualitative research method with a descriptive research design. This study used Dunn's evaluation theory (2003:611) which consisted of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Accuracy. The results showed that the implementation of policies by the Business Cooperatives Micro and Trade Department had not been implemented properly which was proven by the lack of supervision of street vendors in the market area, the implementation of the policy has not been efficient in terms of human resources where there was still a lack of manpower to manage the market, and the socialization and supervision to traders by management officers had not worked optimally. The results also showed that management was less assertive against traders who did not comply with the rules, that community participation was very low in obeying the existing rules, and the obstacles faced were the lack of discipline of traders so that they had not been able to change the old service pattern. The researcher suggests that the management should be more assertive and active in doing supervision and socialization towards the traders in order to improve the market condition and a better market setting.

Keywords: Evaluation, Policy, Middle People's Market Setting

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kota merupakan konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya sebagai tempat pemusatan penduduk. Kota juga merupakan penyedia fasilitas bagi pertumbuhan suatu wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam serta lahan. Upaya pemerintah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fasilitas-fasilitas umum yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat salah satunya seperti dengan adanya Pasar tradisional. Fasilitas-fasilitas umum yang ada dapat mempermudah kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pasar menjadi salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi suatu daerah. Pasar merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan politis, dan lain-lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar tidak hanya menjadi

tempat transaksi antara penjual dan pembeli melainkan pasar telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar. Pasar Rakyat Tengah, merupakan salah satu pasar sentral yang berada di Kota Pontianak. Keberadaan pasar yang strategis, yang berada di tengah-tengah kota menjadikan Pasar Rakyat Tengah mudah diakses dari berbagai daerah sekitar Kota Pontianak. Namun sayang, ditengah persaingan keras dengan banyak adanya pasar modern keberadaan pasar rakyat sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah tak sebanding dengan pergerakan pasar modern yang semakin pesat yang merambah hingga ke pelosok daerah. Citra pasar rakyat yang buruk, seperti becek, kumuh, ketidakpastian harga hingga alasan gengsi membuat banyak masyarakat kini beralih ke pasar modern dan perlahan meninggalkan pasar rakyat maupun tradisional. Akan tetapi, keberadaan pasar rakyat tidak mungkin ditiadakan karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi menengah kebawah, sehingga tidak memiliki daya beli yang

cukup besar untuk terus menerus belanja di pasar-pasar modern. Selain itu, keadaan pasar yang *semrawut* tentu membuat pemandangan tidak sedap menjadi potret utama tata kota yang buruk bagi daerah tersebut. Pengaturan atau pengelolaan sebuah pasar tradisional kota Pontianak tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pengaturan pasar yang memiliki tujuan salah satunya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya. Di dalam peraturan daerah Nomor 2 tahun 2017 pada bab VI salah satu pasal yang menerangkan tentang pengelolaan pasar rakyat pada pasal 21 dan pasal 22 point c menyebutkan bahwa pengelolaan pasar rakyat memiliki peran berupa melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang. Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui : a. Peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar. b. Peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Pentingnya dilakukan pembinaan dan pengawasan guna menciptakan pasar yang bersih dan nyaman serta keamanannya. Selama ini pasar tradisional identik dengan kumuh, kotor serta *semrawut* merupakan citra pasar yang buruk, untuk itu perlu dilakukan pembinaan serta pengawasan dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pasar tradisional agar mampu bersaing di tengah arus berkembang pesatnya pasar modern. Kemudian pasal 14 menyebutkan bahwa pasar rakyat atau pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana lainnya. Namun pada kenyataannya keadaan tempat parkir di Pasar Rakyat Tengah kurang memadai, sehingga seringkali menggunakan

bahu jalan dan mengakibatkan kemacetan disekitar pasar, serta banyak pemilik kios di Pasar Rakyat Tengah yang tidak menempati kiosnya dan memilih berjualan di kaki lima, sehingga pemandangan pedagang yang tidak tertata rapi menjadi persoalan yang perlu diperbaiki serta persoalan kebersihan pasar yang belum terjaga merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Namun dalam pengelolaannya, permasalahan-permasalahan seperti fasilitas atau sarana fisik pasar yang kurang diperhatikan, ketidaktertiban pedagang yang berkaitan dengan pemakaian dan pengaturan tempat berjualan. Keadaan tempat parkir yang seringkali memakan bahu jalan mengakibatkan kemacetan disekitar pasar, meskipun kondisi fisik pasar yang telah diperbaiki namun pada kenyataannya pedagang tetap memilih untuk berdagang di sepanjang jalan pasar serta kebersihan pasar yang belum terjaga dan pedagang yang tidak tertata rapi merupakan persoalan yang perlu segera diperbaiki. Berdasarkan pada

fenomena diatas, penelitian berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Rakyat Tengah, Kota Pontianak”

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan dalam penataan pasar sehingga masih banyak ditemukan PKL.
2. Kurangnya upaya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang sehingga banyak pedagang yang menumpuk di lantai dasar bahkan berjualan di trotoar.
3. Kurangnya sumber daya manusia pasar dalam melakukan pemeliharaan pasar sehingga pasar terlihat kumuh dan kotor.
4. Minimnya sarana pembuangan sampah yang dimiliki Pasar

Rakyat Tengah sehingga banyak yang membuang sampah sembarangan.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas maka penelitian ini di fokuskan pada Evaluasi Hasil Pelaksanaan Dan Pembinaan pengelolaan pasar Pasar Rakyat Tengah di Kota Pontianak

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian dan fokus penelitian maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimana Evaluasi Hasil Kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Tengah di Kota Pontianak”?

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi hasil kebijakan pengelolaan pasar tradisional yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 terhadap Pasar Rakyat Tengah di Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi Sebagai sumbangan ilmiah dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk menambah wawasan peneliti dan pembaca, menjadi referensi untuk penelitian di masa mendatang yang memiliki relevansi, terutama bagi kajian kebijakan publik. Khususnya dalam bidang administrasi publik yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik dan tata kelola pasar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi instansi terkait. yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak serta sebagai rekomendasi evaluasi dalam rangka perbaikan tata kelola pasar yang lebih baik

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang di jalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah yang harus di laksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara Negara. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik menurut pendapat Van meter dan Van Hom (Wahab 2010, 65) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.

b. Implementasi kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara 2014:232), bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Suatu kebijakan akan menjadi angan – angan jika tidak diimplementasikan karena melalui implementasi dapat di ketahui apakah suatu kebijakan mengenai sasaran atau tidak.

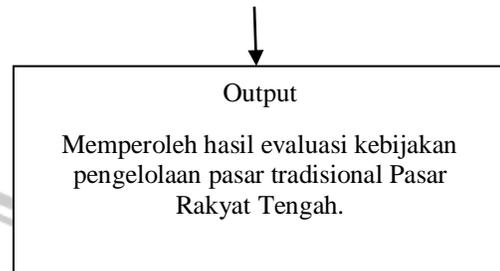
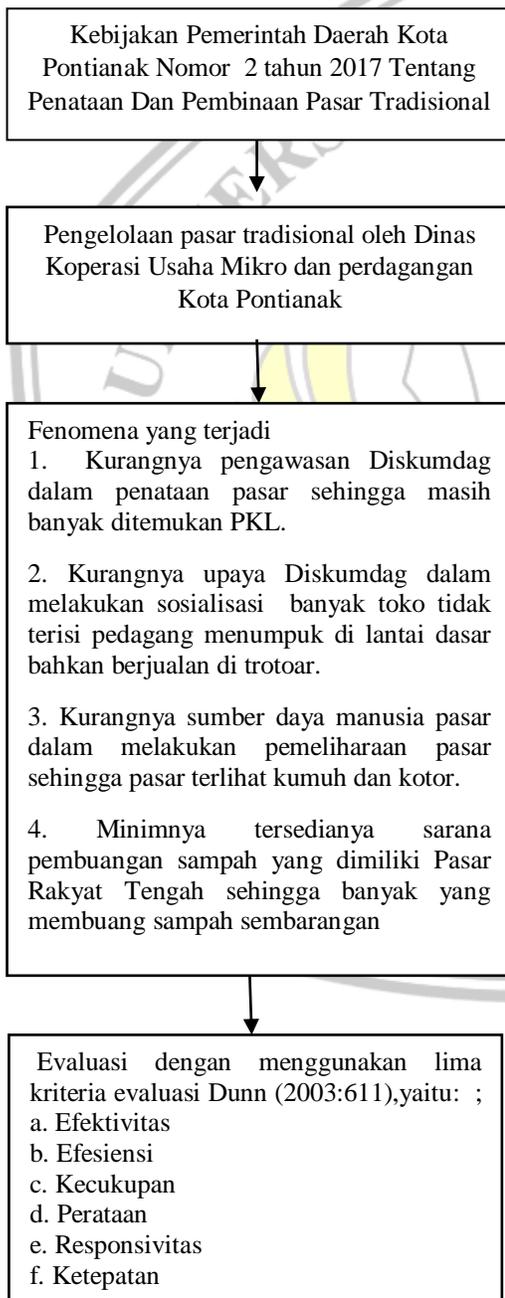
c. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2013:219) kegiatan evaluasi merupakan sebuah tahapan yang penting dalam proses analisis kebijakan publik yang diimplementasikan. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, yaitu untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil seperti yang diinginkan. Oleh karenanya, sebuah evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apa yang

menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut memiliki dampak seperti yang diharapkan.

2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Teori



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moh Nazir (2003:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pariwisata pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dan Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak. Penelitian di lokasi ini atas pertimbangan karena terdapat

masalah yang cukup menarik untuk diteliti yaitu tentang Pengelolaan Pasar rakyat yang belum maksimal dalam pelaksanaan kebijakannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu sesuai teknik untuk menentukan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara jelas dan akurat. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pontianak
2. Ibu Sumarni sebagai pedagang lantai bawah
3. Ibu Dewi sebagai pedagang lantai bawah
4. Bapak Ilham sebagai pedagang lantai bawah

Penentuan objek dalam penelitian ini agar mempermudah penulis untuk melakukan penelitian sehingga tidak menyimpang dari fokus penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah evaluasi hasil kebijakan

Pengelolaan pasar rakyat, di Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak.

D. HASIL PENELITIAN

1. Efektivitas

Efektivitas sendiri sangat erat kaitannya dengan hubungan antara output dengan tujuan kebijakan atau program tersebut. Pasar tradisional ataupun pasar rakyat merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar rakyat ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang. Mengingat pasar tradisional atau pasar rakyat identik dengan kumuh, semraut hingga masalah kebersihan. Maka dari itu sangat dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal penataan pasar yang lebih baik, guna meningkatkan pelayanan yang profesional supaya dapat meningkatkan daya tarik masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan suatu program dapat dilihat dari ketercapaian tujuan

program tersebut. Hal ini tentu berkenaan dengan tujuan dari peraturan pengelolaan pasar rakyat itu sendiri yaitu memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi serta pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri.

Berdasarkan observasi penulis dari hasil penelitian penyelenggaraan program revitalisasi pasar berhasil menjadikan keadaan lingkungan pasar menjadi lebih nyaman untuk pedagang dan masyarakat konsumen. Sesuai hasil wawancara bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan sudah berusaha melaksanakan tugas mereka dengan baik. Namun pedagang itu sendiri yang susah untuk diatur. Pedagang menumpuk di lantai bawah sehingga menyebabkan kepadatan dan sulitnya akses jalan karena dipenuhi pedagang. Belum lagi parkir kendaraan yang di parkir tepat di depan kios sehingga menambah padat nya keadaan di area pasar.

2. Efisiensi

Berbicara tentang efisiensi, maka kita akan membayangkan hal yang berkaitan dengan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan dengan baik dan optimal. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana, sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang ingin dicapai. Hal ini berarti bahwa kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Didalam efisiensi, sebuah kebijakan lebih melihat pada sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan. Hasil wawancara menjelaskan salah satu hambatan yang dialami oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan adalah kurangnya sumber daya manusianya. Diketahui bahwa Dinas terkait memang kekurangan petugas dalam mengawasi keadaan pasar setiap

harinya. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan membentuk suatu tenaga petugas dari pedagang itu sendiri yang di namai asosiasi pasar. Dalam hal ini mereka bertugas untuk menjaga kebersihan pasar dan keamanan pasar. Namun hal ini belumlah efisien dimana pada area pasar tidak disediakan tempat pembuangan sampah, kemudian tidak adanya pos keamanan yang menjaga disekitar pasar .

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.. Salah satu segi kecukupan yang sesuai dengan kebijakan pengelolaan pasar rakyat yaitu, mengenai pembinaan dan pengawasan pasar itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan yang optimal terhadap pedagang akan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik mengenai kualitas barang

kebersihan maupun penataan barang yang baik pula . Dari hasil wawancara penulis dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di pasar Rakyat Tengah belum mencukupi, karena masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala dan konsisten dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pasar yang professional.

Dibutuhkannya perhatian dari pemerintah maupun pihak pengelola untuk meningkatkan kualitas yang baik. Mengacu pada tujuan dari kebijakan pengelolaan pasar rakyat yaitu, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada para pedagang agar mampu berkembang, bersaing, maju, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dinas pengelolaan pasar itu sendiri berperan sebagai sarana dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pendampingan serta pengawasan kepada para pedagang guna mengatur dan menata keberadaan

pedagang. Untuk itu dinas pengelola diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang tak kunjung dapat terselesaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan seperti pedagang kaki lima ini sangat dibutuhkan perhatian khusus oleh dinas terkait selaku pengelola pasar rakyat, sesuai pernyataan dari salah satu narasumber bahwa keberadaan pedagang kaki lima ini merugikan pedagang lainnya, terutama pemilik kios. Mereka merasa dirugikan dengan keberadaan pedagang kaki lima yang menutupi akses jalan. Belum lagi banyaknya juru parkir yang memarkirkan kendaraan yang menggunakan bahu jalan sehingga membuat kepadatan.

Dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan berfungsi sebagai pengelola pasar rakyat, untuk itu dibutuhkan keseriusan dan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas pasar rakyat tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh

dinas pengelola pasar rakyat yaitu dengan adanya pembinaan atau sosialisasi secara berkala. Penataan pasar yang baik dan lingkungan pasar yang bersih dan aman menjadi wujud nyata dari keberhasilan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan pasar. Sebagian pedagang di Pasar Rakyat Tengah sudah baik dalam penataan barang maupun tempat berjualannya. Walaupun masih ada saja pedagang yang tidak mematuhi aturan seperti menambah lapak jualan dan menggunakan bahu jalan untuk menyimpan dagangannya.

4. Perataan

Kriteria perataan menurut Dunn erat hubungannya apakah manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok sasaran yang berbeda. Kriteria ini melihat apakah manfaat hasil pelaksanaan kebijakan sudah dirasakan oleh semua kelompok sasaran. Perataan berkaitan tentang keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik dari sebuah kebijakan. Dari hasil wawancara penulis terhadap kepala

bidang pengelolaan pasar rakyat bahwa Dinas pengelola pasar Rakyat Tengah pernah melakukan sosialisasi terhadap pedagang untuk memberikan edukasi bagaimana tata cara penataan barang dagangan, bagaimana menjadi pasar sehat, bersih, nyaman. Hal ini berkaitan dengan tujuan diadakannya sosialisasi tersebut agar tercipta pasar yang mampu bersaing dengan pasar-pasar modern yang berkembang pesat saat ini. Menjadikan pasar rakyat pasar yang digemari oleh golongan masyarakat baik masyarakat yang menengah kebawah maupun menengah keatas. Menciptakan daya tarik tersendiri agar pasar rakyat banyak disukai konsumen dalam segi pelayanan maupun penyediaan barang dagangannya.

Namun sesuai pengamatan penulis dan hasil wawancara penulis dengan pedagang Pasar Rakyat Tengahterkait dengan pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan kepada pedagang dan pengawasan kepada pedagang kaki lima petugas pengelola tidak melakukannya secara tegas,

sehingga kian hari jumlah pedagang kaki lima semakin bertambah keberadaannya. Pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh kepada tiap- tiap blok pasar. Dimana setiap blok pasar penuh dengan pedagang yang menambah lapaknya sampai ke jalan. Belum lagi pedagang kaki lima yang memadati separuh jalan. Dalam hal ini perlu tindakan tegas dari pemerintah maupun pihak pengelola mengenai penataan pedagang maupun penataan pedagang kaki lima yang hingga saat ini permasalahannya belum teratasi. Untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut maka diperlukan adanya koordinasi antara pengelola, penyelenggara, dan sasaran kebijakan. Terkait sosialisasi dan pembinaan, dapat dikatakan dinas pengelola sudah melakukan sesuai pada peraturan pengelolaan pasar yaitu wajib melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang. Hanya saja hasilnya belum mampu memecahkan permasalahan yang ada. Dalam hal ini perataan pada kebijakan pengelolaan pasar rakyat lebih di kaitkan dengan

ketepatan sasaran yang diinginkan, apakah sosialisasi yang diberikan sesuai target/ kebutuhan para pedagang atau tidak.

5. Responsivitas

Kriteria responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Perbedaan pola pikir dan sudut pandang setiap sasaran kebijakan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan suatu kebijakan.

Sebab tidak semua masyarakat dapat menerima dan melaksanakan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah sebagai sasaran kebijakan. Berdasarkan pernyataan diatas bahwa memang diperlukan tindakan tegas dari Dinas terkait dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima yang bukan hanya meresahkan petugas namun dirasa merugikan

pedagang yang lain. Maka dari itu sangat diharapkan alternatif-alternatif dari petugas maupun pihak pengelola untuk dapat mengatasi masalah ini. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar ini yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pasar agar mampu bersaing dengan pasar modern yang berkembang pesat saat ini. Diharapkan pihak pengelola pasar itu sendiri mampu meningkatkan manajemen pengelolaan pasar dengan baik dan memastikan semua pedagang mematuhi segala peraturan yang ada. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi pasar yang indah, nyaman dan aman. Dalam hal ini Dinas pengelolaan pasar rakyat sebagai penyelenggara pengelolaan pasar Rakyat Tengah harus terus berupaya menghimbau kepada pedagang agar lebih peduli terhadap lingkungan pasar. tentu adanya kebijakan peraturan pengelolaan pasar rakyat diharapkan memiliki dampak yang positif bagi ketertiban, dan kenyamanan area pasar jika dilaksanakan dengan baik. Meski masih kurangnya kesadaran yang

dimiliki oleh pedagang menjaga kebersihan dan kenyamanan di area Pasar Rakyat Tengah ini. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, seperti kurangnya pengawasan dan kurangnya tindakan tegas yang dilakukan dinas terkait.

6. Ketepatan

Dari segi ketepatan tentu berkenaan dengan konsistensi dari tujuan kebijakan dengan realita yang terjadi dilapangan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau tidak. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dalam hal ini mengkaitkan keenam kriteria diatas untuk menilai evaluasi hasil kebijakan pengelolaan pasar rakyat, sebagai pencapaian hasil dan tujuan kebijakan pengelolaan pasar rakyat dalam meningkatkan kualitas pasar dengan menggunakan teori dari William Dunn.

Kebijakan pengelolaan pasar rakyat diharapkan mampu

meningkatkan kualitas pasar dan peningkatan pelayanan kepada konsumen maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar. Dari pernyataan diatas bahwa perbaikan bangunan pasar di Pasar Rakyat Tengah dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pedagang yang ingin berjualan dengan jenis dan ragam yang sama. Namun, pelaksanaan kebijakan pengelolaan di Pasar Rakyat Tengah ini belumlah tercapai karena pelaksanaan kebijakan yang dilakukan belum mampu mengatasi keresahan pedagang mengenai keberadaan pedagang kaki lima. Meskipun dinas pengelola sudah berkomitmen melaksanakan peraturan daerah dengan sebaik-baiknya walaupun dalam pelaksanaan yang sudah-sudah masih dirasa belum memuaskan bagi pedagang. Dari hasil penelitian, secara ketepatan belum bisa dikatakan berhasil, karena kebijakan yang dilakukan belum merata dan efisien, sebab tidak adanya alternatif lain yang dilakukan oleh pihak dinas pengelolaan pasar rakyat dalam menangani masalah penataan pedagang di Pasar Rakyat Tengah ini,

seharusnya pihak pengelola dalam hal ini dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi keresahan pedagang terkait adanya pedagang kaki lima di pasar Rakyat Tengah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Tengah di Kota Pontianak belum sepenuhnya berhasil. Dengan menggunakan teori dari William N. Dunn terdapat 6 kriteria evaluasi yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Dari hasil penelitian dengan adanya penyelenggaraan program revitalisasi pasar di Pasar Rakyat Tengah berhasil menjadikan keadaan lingkungan pasar menjadi lebih nyaman untuk pedagang dan masyarakat konsumen. Namun secara efektivitas belum dikatakan efektif dari segi keadilan, yaitu pada proses

penertiban pedagang kaki lima dimana pihak pengelola tidak konsisten dalam penertiban pedagang kaki lima mereka bebas berjualan di area pasar tempat yang bukan semestinya.

2. Efisiensi

Secara efisiensi, pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat tengah belum dikatakan berhasil, Hal ini terlihat masih banyak permasalahan yang terjadi karena kurangnya sumber daya manusia. Kemudian dari segi dana yang di gunakan untuk pembangunan pasar seperti keadaan lantai dua pasar pada awal pembangunan akan dijadikan tempat untuk berjualan makanan namun kenyataannya hanya menjadi tempat gudang atau penyimpanan barang dagangan.

3. Kecukupan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahan yang terjadi di Pasar Rakyat Tengah. Hal ini berkaitan dengan pembinaan dan sosialisasi dan pengawasan yang sudah

dilakukan pihak terkait, dimana pencapaian dari hasil pembinaan dan sosialisasi belum memberikan hasil yang maksimal terhadap para pedagang.

4. Perataan

Dari segi perataan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Pasar Rakyat Tengah sesuai dengan peraturan daerah 2017 bahwa pihak pengelola melaksanakan kebijakan wajib memberikan pembinaan dan sosialisasi terhadap semua pedagang, dan hal ini telah dilakukan oleh pihak pengelola. Namun masih saja ada pedagang yang tidak mematuhi aturan, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang tidak optimal.

5. Responsivitas

Dari hasil penelitian bahwa keberadaan Pasar Rakyat Tengah ini mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat, sangat terbantu dengan adanya pasar rakyat ini karena tempat yang strategis. Adanya kebijakan pengaturan pasar ini berdampak positif bagi ketertiban dan kenyamanan di area pasar sehingga memuaskan pedagang dan

konsumen. Sedangkan yang dinilai kurang baik adalah masih kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh pedagang pasar untuk menjaga kebersihan dan ketertiban area pasar.

6. Ketepatan

Dari hasil penelitian bahwa adanya pembangunan dan penataan di Pasar Rakyat Tengah dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pedagang pedagang yang berjualan dengan jenis dan ragam yang sama. Adapun hambatan yang masih terjadi sampai saat ini yaitu para pedagang masih belum bisa merubah pola pikir dan pelayanan mereka.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, adapun saran yang peneliti sampaikan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan selaku penyelenggara kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat, sebagai berikut :

1. Efektivitas, sebaiknya perlunya tindakan tegas pemerintah terhadap pihak pengelola agar dapat memberikan penjelasan mengenai

kebijakan pengelolaan pasar ini, dan bagaimana penerapan dalam pelaksanaannya serta harus konsisten terhadap aturan yang telah diberlakukan.

2. Efisiensi, sebaiknya pihak pengelola dalam manajemen petugas yang ada, hal ini terkait dengan koordinasi antara pihak pengelola dan asosiasi pasar yang harus berjalan dengan baik, dalam hal pengawasan untuk penataan pedagang pasar.

3. Kecukupan, untuk pencapaian tujuan suatu kebijakan tentunya efektivitas dan efisiensi harus sejalan dengan baik dalam penerapannya. Diharapkan pihak pengelola dapat membantu dan memfasilitasi pedagang dalam meningkatkan kualitas pelayanannya yaitu dengan cara mengadakan pelatihan maupun sosialisasi secara intensif kepada semua pedagang.

4. Perataan, seharusnya pihak pengelola lebih tegas dalam memberikan teguran kepada pedagang yang tidak mematuhi aturan, koordinasi antara petugas asosiasi pasar juga sangat diperlukan, berkaitan

dengan pengawasan yang dilakukan sebaiknya pihak pengelola dapat meningkatkan dalam pengawasan langsung dilapangan.

5. Responsivitas, sebaiknya pihak pengelola dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang Pasar Rakyat Tengah yang tidak digunakan, seperti pemanfaatan lantai dua pasar yang tidak terpakai dengan baik. Dimanfaatkan untuk pedagang yang berjualan dengan disepanjang sebagian badan jalan pasar.

6. Ketepatan, sebaiknya pihak pengelola harus melakukan sosialisasi yang lebih insentif atau berperan secara aktif dalam melaksanakan aturan yang ada. Dan melakukan upaya-upaya atau mencari alternatif dalam membenahi permasalahan yang terjadi.

F. REFERENSI

1. Buku-buku

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Ahmadi, Abu. 1997. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, Irfan. 2013. *kebijakan publik*. Jakarta: Universitas terbuka
- Mulyana, Dedi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Riant. 2011, *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho D, Riant. 2007. *Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Pasalong, Harbani. 2018. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Suharno. 2013.. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Sugiyono. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: alfabeta Bandung
- Subarsono, AG. 2010. *Analisi Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan publik: teori proses dan studi kasus*, Yogyakarta: PT Buku Seru.
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka.

2. Dokumen

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

3. Referensi Jurnal Skripsi

Ernawati. 2016. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah". Universitas Lampung. Vol. 1 (2) 28-06

Aji, Wahyu. 2015. "Evaluasi Kebijakan
Penataan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan toko
modern di Kabupaten
Blora. Universitas Diponegoro
Vol. 1 (3) 29-08

Dwirahayu, Agustina Intan. 2013. "Evaluasi Kebijakan
Pengaturan Pasar
Tradisional Pasar Bulu Di
Kota Semarang. Vol 2 (1) 30-
06

